

PENGARUH KEKAYAAN DAERAH (PAD), TOTAL ASET, JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT KETERGANTUNGAN, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi LKPD pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2016)

Pankrasius T. Suryadi

Alumni Fakultas Ekonomi UST

Email: armeida300@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the influence of Regional Wealth (PAD), Total Assets, Total Population, Level of Dependency, and Audit Findings on the Level of Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) in Central Java Province 2014-2016. The population in this study is all districts/cities across the province in Central Java in 2014-2016. The sample used is purposive sampling, so that obtained as much as 81 LKPD. The type of data used is secondary data. Data obtained from the official website of regencies/municipalities in Central Java Province in the form of financial statements that have been audited by BPK and BPS office of Central Java Representative. The analysis technique used is multiple linear regression method. The result of regression test shows that the regional wealth (PAD), Total Asset, Total Population, Level of Dependency, and Audit Finding simultaneously have a significant positive effect on the disclosure of Local Government Financial Statement. Partially, PAD and Dependency Level have no effect on LKPD disclosure, total assets have a significant positive effect on LKPD disclosure, total population and audit findings have significant negative effect on LKPD disclosure.

Keywords: *Regional Wealth, PAD, Assets, Population, Level of Dependency, Audit Finding, and LKPD Disclosure.*

PENDAHULUAAN

Laporan keuangan merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi peraturan-peraturan, tetapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan dalam memahaminya. Tujuan penyediaan informasi dalam laporan keuangan salah satunya adalah untuk kepentingan transparansi, yakni memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010,

pengungkapan laporan keuangan yang disusun pemerintah di Indonesia menggunakan prinsip pengungkapan lengkap, dimana laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masih menjadi perdebatan. Adanya pertentangan atas hasil penelitian, dan ketidakkonsistenan hasil atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan, maka dibutuhkan penelitian lanjutan guna menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan, dan temuan audit untuk melihat kondisi terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAK DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Kekayaan Daerah (PAD)

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah (Setyaningrum, 2012). Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Retnowati, 2016). Oleh sebab itu, setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya agar PAD yang didapat meningkat.

Aset

Aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Aset yang dimiliki juga dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar (Hilmi, 2011).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mencerminkan kompleksitas pemerintahan. Kompleksitas meningkatkan pengungkapan. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih luas dalam laporan keuangan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya kepada masyarakat dan mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Cahyono, 2013).

Tingkat Ketergantungan

Maulana (2015) dalam Lesmana (2010) mendefinisikan tingkat ketergantungan/*intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi kepada Pemda untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, Pemda membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut Undang-Undang.

Temuan Audit

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan Mulyadi (2002).

Pengembangan Hipotesis

Hubungan kekayaan daerah (PAD), Total Aset, Jumlah Penduduk, Tingkat Ketergantungan, dan Temuan Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada pemakai laporan keuangan, sehingga dapat membantu dalam membuat keputusan. Dalam penelitian ini digunakan variabel kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan, dan temuan audit untuk mengukur tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi pengungkapan yang memudahkan bagi para pengguna laporan keuangan. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, yakni laporan keuangan dapat memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada pengguna laporan keuangan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Diharapkan secara bersama-sama kelima variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan Laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa tengah periode 2014-2016.

H1: Kekayaan Daerah (PAD), Total Aset, Jumlah Penduduk, Tingkat Ketergantungan, dan temuan Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan kekayaan daerah (PAD) terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan Lestiani (2008) dan Hilmi (2011) yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara kekayaan daerah (PAD) dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Semakin besar kekayaan daerah, maka makin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah yang meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangannya. Semakin baik kinerja pemerintah semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan. PAD merupakan salah satu pengukuran dari kekayaan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka menunjukkan semakin baik pula kinerja daerah tersebut. Maka semakin besar dorongan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan *stakeholders* Hilmi (2011).

H2: Kekayaan daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Total Aset terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan Khasanah (2014) menunjukkan bahwa total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Putri (2015) mendapatkan bahwa ukuran daerah yang diprosikan dengan total aset menunjukkan pengaruh positif signifikan. Hal ini berarti bahwa daerah dengan aset daerah yang besar akan mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang lebih luas. Pemerintah daerah yang berukuran besar berarti bahwa Pemda tersebut memiliki aset daerah yang lebih besar. Besarnya aset daerah tersebut berarti pula bahwa Pemda memiliki item-item penyusun aset seperti aset tetap maupun aset lancar yang lebih

banyak. Kondisi demikian memungkinkan pemerintah daerah akan mengungkapkan LKPD yang lebih luas

H3: Total aset berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hendriyani dan Tahar (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran yang menggambarkan kompleksitas suatu daerah. Artinya semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut sehingga semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan.

H4: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Tingkat Ketergantungan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Darmastuti (2010) yang menemukan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja hibah pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah

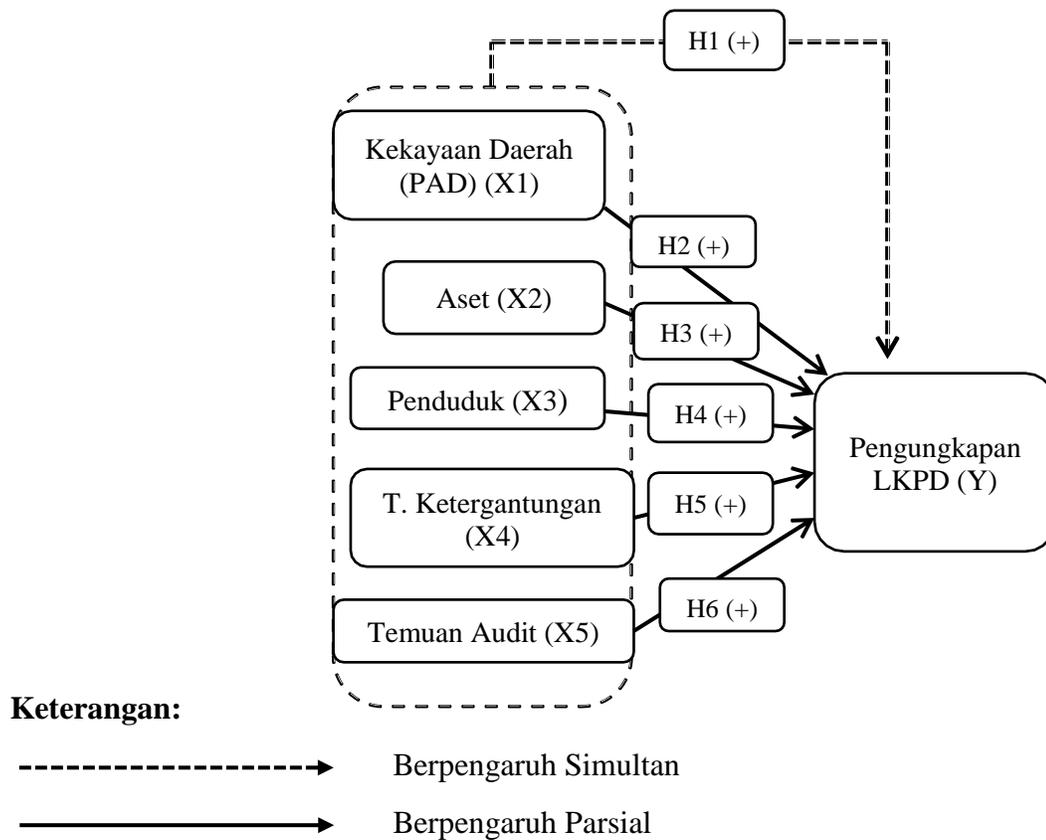
H5: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Temuan Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit merupakan penyimpangan, pelanggaran atau ketidakwajaran yang ditemukan oleh auditor berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan koreksi. Pengungkapan yang lebih besar dilakukan sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK untuk melakukan perubahan dimasa yang akan datang Maulana (2015).

H6: Temuan audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka pemikiran



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Independen (bebas)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan, dan temuan audit.

Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2016.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung yang dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data LKPD yang telah diaudit BPK selama kurun waktu 2014-2016. Data LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016 diperoleh dari website resmi kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengah. Sementara untuk data lain yang tidak ditemukan di LKPD bisa diperoleh di perpustakaan BPS perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan website resmi Kementerian Keuangan Indonesia

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan SPSS untuk alat uji dalam pengujian. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji Statistik dan uji Asumsi Klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016 yang telah diaudit oleh BPK serta memiliki ketersediaan data yang lengkap setiap tahunnya. Data yang harus dimiliki tersebut terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan total pendapatan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran, total aset yang diperoleh dari Neraca, jumlah penduduk yang terdapat pada perpustakaan BPS perwakilan Jawa Tengah, dan data temuan dan penyimpangan yang tersaji dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data pada setiap variabel seperti *mean*, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

Descriptive Statistics variabel penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan	81	70.00	86.23	78.8680	4.03677
PAD	81	25.65	26.94	26.1687	.26310
ASET	81	28.00	29.67	28.6875	.30950
POPULATION	81	11.72	14.35	13.5973	.60790
IRGOV	81	.52	.78	.6145	.05508
FIND	81	.00	8.00	3.2469	1.87437
Valid N (listwise)	81				

Uji Statistik

Uji Simultan (F)

Hasil Uji Simultan (F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	310.689	5	62.138	4.693	.001 ^a
	Residual	992.954	75	13.239		
	Total	1303.643	80			

Dari hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,001 di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen: Kekayaan Daerah (PAD), Total Aset, Jumlah Penduduk, Tingkat Ketergantungan dan Temuan Audit secara signifikan positif berpengaruh terhadap variabel Pengungkapan LKPD.

Uji Parsial t

		Hasil Uji Parsial				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	103.854	49.330		2.105	.039
	PAD	-4.250	2.328	-.277	-1.825	.072
	ASET	4.428	1.771	.340	2.501	.015
	POPULATION	-2.499	.737	-.376	-3.392	.001
	IRGOV	-8.632	8.457	-.118	-1.021	.311
	FIND	-.471	.227	-.219	-2.073	.042

Hasil Uji Hipotesis 1

Berdasarkan hasil tabel 4.9 untuk variabel PAD diketahui nilai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $-1,825 < 2,377$ dengan nilai signifikan sebesar $0,072 > 0,05$ dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hal ini berarti bahwa semakin tingginya kekayaan daerah (PAD) tidak berdampak pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan H_a tidak terdukung dan H_o terdukung. Hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis satu yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Dengan demikian hipotesis satu tidak terdukung.

Hasil Uji Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4.9 variabel total aset diketahui nilai t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $2,501 > 2,377$ dengan nilai signifikan sebesar $0,015 < 0,05$ dan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin besar aset suatu daerah maka semakin besar pula tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan H_a terdukung dan H_o tidak terdukung. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis dua yang menyatakan total aset berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Dengan demikian hipotesis dua terdukung.

Hasil Uji Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4.9 variabel jumlah penduduk diketahui nilai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $-3,392 < 2,377$ dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti banyaknya jumlah penduduk suatu daerah maka akan semakin rendah dorongan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi. Sehingga dapat disimpulkan H_a tidak terdukung dan H_o terdukung. Hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis tiga yang menyatakan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Dengan demikian hipotesis tiga tidak terdukung.

Hasil Uji Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 4.9 variabel tingkat ketergantungan diketahui nilai t $< t$ tabel yaitu sebesar $-1,021 < 2,377$ dengan nilai signifikan sebesar $0,311 > 0,05$ dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan suatu daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan H_a tidak terdukung dan H_o terdukung. Hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis empat yang menyatakan tingkat ketergantungan

berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Dengan demikian hipotesis empat tidak terdukung.

Hasil Uji Hipotesis 5

Berdasarkan hasil tabel 4.9 variabel temuan audit diketahui nilai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $-2,073 < 2,377$ dengan nilai signifikan sebesar $0,042 < 0,05$ dan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar jumlah temuan, maka semakin rendah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan H_a tidak terdukung dan H_o terdukung. Hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis lima yang menyatakan temuan audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. dengan demikian hipotesis lima tidak terdukung.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.488 ^a	.238	.188	3.63860

Berdasarkan hasil tabel diperoleh nilai *Adjusted R square* sebesar 0,188 yang berarti pengaruh PAD, Total Aset, Jumlah Penduduk, Tingkat Ketergantungan, dan Temuan Audit sebesar 18,8 % sedangkan 81,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

PENUTUP

Kesimpulan

Kekayaan daerah, total aset, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan, dan temuan audit secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada provinsi Jawa Tengah periode 2014-2016. Secara parsial kekayaan daerah (PAD) dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial total aset berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial jumlah penduduk dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak variabel atau menggunakan variabel lain dan memperbanyak sampel penelitian dengan karakteristik yang beragam dari berbagai sektor dan memperpanjang periode penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan yang ada dalam pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendriyani, Ririn dan Afrizal Tahar. 2015. “*Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia*”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol.22 No.1, Maret, hal 25-33.
- Maulana, Candra. 2015. “*Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terdapat di Pulau Jawa tahun 2013)*”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Mulyadi. (2002). Auditing. Buku 1, edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat
- Hilmi, Amirudin Zul. 2011. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Cahyono, Yulita Triandari. 2013. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur*”. Skripsi. Surabaya : Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala.
- Khasanah, Nur L. 2014. “*Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang
- Setyaningrum, Syafitri. 2012. “*Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*”. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Volume 9, Nomor 2. Universitas Indonesia.
- Retnowati, Reny. 2016. “*Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, LEVERAGE Dan INTERGOVERNMENTAL Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*”. Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Darmastuti, D dan S Dyah. 2010. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2009*”. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Putri, Rizky Arinda. 2015. “*Faktor Karakteristik dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013*”.
- Lesmana, S. I. 2010. “*Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*”. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Liestiani, Annisa. (2008). “*Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*”. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.